



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2018**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan seiring berkembangnya reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim yang biasa disebut "**good governance**" dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya suprimasi hukum, transparansi, yang berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, dan transparan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada ketiga aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PROBOLINGGO**



Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19671109 199403 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I & II
DAFTAR ISI	III
IKHTISAR EKSEKUTIF	IV - VI
BAB 1 PENDAHULUAN	Hal. 1-3
1.1. Gambaran Umum Organisasi	
1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi	
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	Hal. 4-7
2.1 Rencana Strategis	
2.2 Program dan Kegiatan	
2.3 Perjanjian Kinerja	
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	Hal. 8-19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Realisasi Anggaran	
BAB 4 PENUTUP	Hal. 20
4.1 Kesimpulan	
4.2 Langkah – langkah untuk Meningkatkan Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu

:

1. Bisa di gunakan sebagai konsumsi publik, artinya Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan ;
2. Bisa digunakan sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih baik ditahun mendatang, artinya Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 yang menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 perlu di evaluasi guna mengetahui nilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Untuk mewujudkan visi **“Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan ”**, melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya(Asean Community).

2. Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.

3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik.

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

4. Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan.

Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

5. Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kelima strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), bahwa pembangunan Kota Probolinggo adalah pembangunan untuk semua tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2018 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1. Pembentukan Organisasi

Organisasi Bagian Pemerintahan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

2. KEDUDUKAN ORGANISASI

Kedudukan Organisasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo adalah unit kerja yang melaksanakan tugasnya di bawah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

(1) Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta melaksanakan tugas otonomi daerah, kerja sama serta pemerintahan kecamatan.

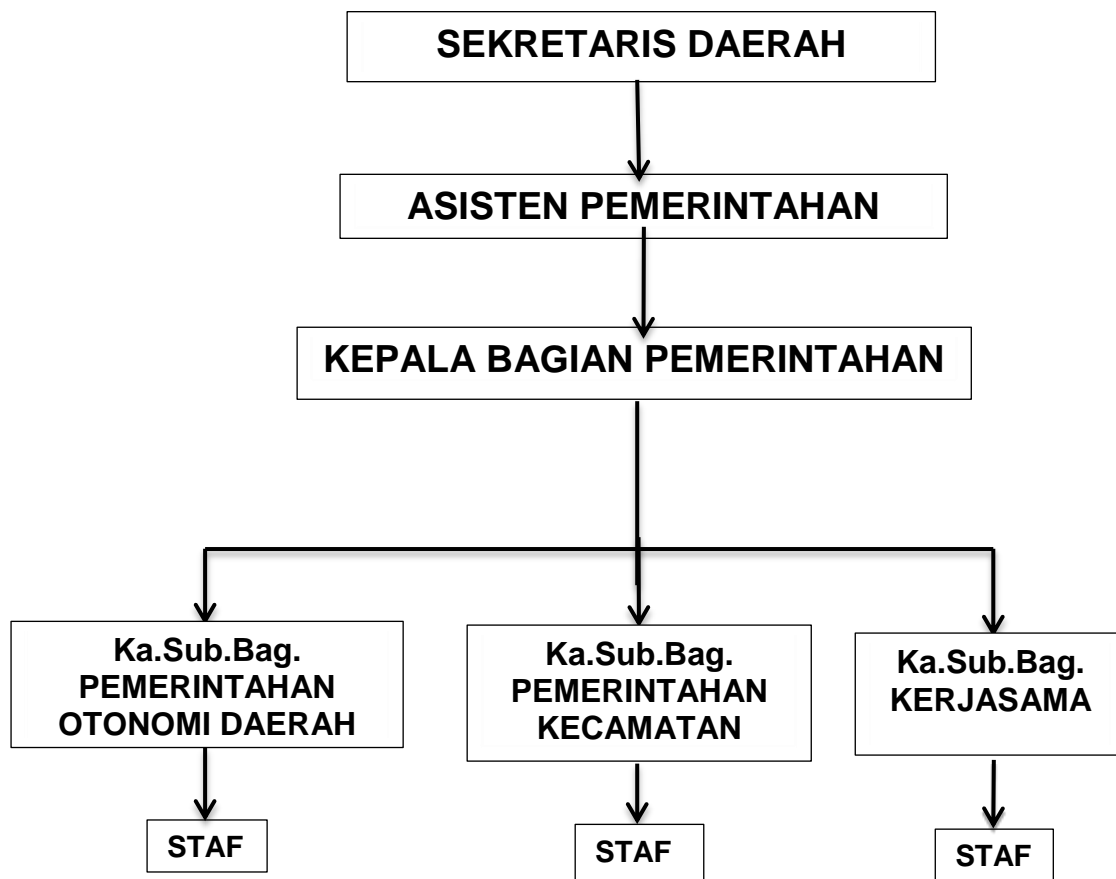
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan dibidang kewenangannya;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan program urusan dibidang kewenangannya;
3. Pengkoordinasian pelayanan administrasi urusan dibidang kewenangannya;
4. Pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan dibidang kewenangannya;
5. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan;

6. Pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Pemerintahan; dan
7. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bagan atau Struktur Bagian Pemerintahan yakni sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



1.2. Permasalahan Utama Yang Dihadapi oleh Instansi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selama ini, permasalahan yang dihadapi di Bidang Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya kompetensi Pelaksana dan pemahaman antar OPD yang berbeda sehingga berakibat pada kurang efektifnya dalam penyelesaian masalah yang ada.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi pada beberapa Kecamatan terutama berkenaan dengan jaringan internet sehingga berakibat pada lambatnya pemenuhan data kewilayahan.
3. Masih kurangnya pemahaman dari OPD teknis dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam penyusunan LPPD maupun naskah kerjasama. Dukungan OPD teknis terhadap hal dimaksud akan berdampak signifikan terhadap capaian nilai EKPPD dan besarnya naskah perjanjian kerja sama yang diimplementasikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran dari misi serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai serta diraih pada masa yang akan datang. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan Bagian Pemerintahan yang menggambarkan sebuah keinginan yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Dengan berlandaskan misi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, maka adapun sasarannya adalah sebagai berikut : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.2 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan pada Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapai tujuan pada Bagian Pemerintahan utamanya dalam hal pemenuhan Administrasi Perkantoran pada Bagian Pemerintahan yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas operasional rutin kantor Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam jangka waktu satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
4. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian Pemerintahan dapat tercapai, khususnya dalam hal pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan alat kantor alat rumah tangga alat studio dan alat komunikasi
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, dan Alat Komunikasi.
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian Pemerintahan dapat tercapai, khususnya dalam hal peningkatan disiplin aparatur, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta para aparatur OPD diharapkan dapat berpartisipasi langsung pada penyelenggaraan momen peringatan hari jadi kota Probolinggo, hari jadi provinsi, dan hari besar nasional sehingga para aparatur akan selalu mengingat momen kesejarahan yang terjadi di daerah, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari – hari Besar Nasional.
2. Penyelenggaraan Peringatan dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu berdaya saing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusiannya yang memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini ditetapkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Bagian Pemerintahan dalam bidang administrasi keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang tertib administrasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam

pencarian data mengenai keuangan serta sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pencapaian realisasi kinerja dan keuangan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

6. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah.

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan Bagian Pemerintahan dalam bentuk profil Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo yaitu sebagai bukti pengimplementasian dalam pelaksanaan anggaran yang sudah teralisasi dalam berbagai kegiatan melalui pendokumentasian atas program dan kegiatan yang meningkatkan kapasitas kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan demi tercapainya Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam 1 (satu) tahun anggaran, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, yang sangat memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar Pemerintah Daerah, terkait potensi dan keaneka ragaman yang dimiliki oleh daerah dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah yang didasarkan pada Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik.
2. Penyelenggaraan APEKSI
3. Monitoring Evaluasi Kerjasama

8. Program Pemanjapan Otonomi Kota.

Program ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam bidang otonomi daerah, Sangat perlu dilakukan adanya beberapa kegiatan berikut, sehingga akan mempermudah dalam memantapkan kinerja, utamanya dalam hal Pemantapan Otonomi Daerah, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Pemerintahan Kelurahan
2. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemantapan Implementasi Kewenangan.
4. Penamaan dan Pembakuan Rupa Bumi.
5. Pembinaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
6. Evaluasi Perkembangan Kelurahan
7. Updating Profil Kelurahan
8. Pelaksanaan Inovasi Nasional (PIN) Desa/Kelurahan.
9. Fasilitasi/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
10. Fasilitasi/Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %
		2. Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100 %
		3. Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis : **1. Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan.**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja yakni :

Tabel 1

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2017	Persentase
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %	51 %	68 %

Keterangan Analisis Pencapaian Kinerja yakni :

1. Kerjasama yang diimplementasikan.

Indikator Kinerja Utama ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan melalui Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik untuk menghasilkan *output*/keluaran jenis pelayanan berupa Dokumen Kesepakatan Bersama (KSB) dan Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS), memiliki target di awal tahun 2018 yakni 75 % dan pada akhir tahun 2018 terealisasi 51%, dengan Persentase Capaian Kinerja 68%. Terdapat target dan realisasi kinerja pada tahun 2018 yang tidak tercapai disebabkan adanya Dokumen Kesepakatan Bersama yang belum ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama serta masih terdapat dokumen yang masih harus dipending atau diselesaikan karena masih ada terdapat ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama.

b Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Tabel 2

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	
			2017	2018
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %	90 %	51 %

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra (Tahun 2019)	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	80%	51%	63,75%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel 4

No	Indikator Kinerja Utama	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
1		N I H I L		

e. Alokasi per- Sasaran Pembangunan

Tabel 5

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	Rp.365.400.000,-	15,77 %

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 6

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %	51 %	68 %	365.400.000,-	318.687.840,-	87,22%

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 7

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	68 %	87,22 %	77,96 %

h. Analisis Penyebab Keberhasilan/ peningkatan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 8

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %	51 %	<p>1. Adanya Dokumen Kerjasama yang masih belum ada Dokumen kesepakatan bersama;</p> <p>2. Masih terdapat dokumen perjanjian Kerja Sama yang dipending atau diskon yang disebabkan adanya ketidak sepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama;</p> <p>3. Kurangnya Sosialisasi terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah kepada Masing- Masing OPD dan Pihak2 yang akan melakukan kerjasama;</p> <p>4. Masih minimnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur terkait Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi/ bimtek tentang Kerjasama Daerah; 2. Menyelenggarakan monitoring/ evaluasi implementasi Kerjasama Daerah.

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 9

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	75 %	51 %	<p>Program :</p> <p>Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik. 2. Penyelenggaraan APEKSI.

2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis : **2. Nilai Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).**

a. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja yakni :**

Tabel 1

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Persentase
1	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%

Keterangan Analisis Pencapaian Kinerja yakni :

1. Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu .

Merupakan Program Pemantapan Otonomi Kota yang terdapat pada kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menghasilkan jenis pelayanan berupa Dokumen Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), memiliki target di awal tahun 2018 yakni 100 % dan pada akhir tahun 2018 terealisasi 100 % dengan Persentase Capaian Kinerja 100%. Dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis dimaksud sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini merupakan hasil dari dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyampaikan LPPD dan pemenuhan terhadap permintaan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

b **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017**

Tabel 2

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	
			2017	2018
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode Renstra**

Tabel 3

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra (Tahun 2019)	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel 4

No	Indikator Kinerja Utama	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
1		N I H I L		

e. Alokasi per- Sasaran Pembangunan

Tabel 5

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Rp.501.955.278,-	21,67 %

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 6

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat Waktu	100%	100%	100%	501.955.278,-	391.460.150,-	77,98%

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 7

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat Waktu	100%	77,98%	128.23 %

h. Analisis Penyebab Keberhasilan/ peningkatan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 8

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	<p>1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disiplin dalam menyampaikan LPPD dan memenuhi permintaan terhadap data2 yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.</p> <p>Tindak lanjut :</p> <p>1. Menyelenggarakan Sosialisasi / Bimtek Penyusunan LPPD;</p> <p>2. Mengikut sertakan OPD pengawas (Inspektorat) dalam penyelenggaraan review/desk evaluasi LPPD.</p>

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 9

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	Program : Pemantapan Otonomi Kota. Kegiatan : 1. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Pemantapan Implementasi Kewenangan. 3. Penamaan dan Pembakuan Rupabumi.

3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis : 3. Prosentase Kecamatan yang berkinerja terbaik.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja yakni :

Tabel 1

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Persentase
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %	61.76 %	102 %

Keterangan Analisis Pencapaian Kinerja yakni :

1. Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik .

Merupakan Program Pemantapan Otonomi Kota yang terdapat pada kegiatan Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Kelurahan serta Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tingkat Kota yang menghasilkan penilaian berupa Kinerja Terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Kecamatan se-Kota Probolinggo, memiliki target di awal tahun 2018 yakni 60 % dan pada akhir tahun 2018 terealisasi 61.76 %. Terdapat jumlah target yang belum mencapai 100 % karena adanya beberapa Kecamatan yang dinilai belum berkinerja baik dalam implementasi Sinergitas Kecamatan serta Kelurahan di bawahnya yang belum termasuk dalam status Kelurahan Sangat Berkembang.

b Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Tabel 2

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	
			2017	2018
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %	60 %	61.76 %

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra (Tahun 2019)	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	65%	61.76%	95,02 %

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel 4

No	Indikator Kinerja Utama	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
1		N I H I L		

e. Alokasi per- Sasaran Pembangunan

Tabel 5

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	Rp.631.257,500,-	27,25 %

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 6

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %	61,76 %	102 %	631.257,500,-	562.486.493,-	89,11%

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 7

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	102 %	89,11 %	114,46 %

h. Analisis Penyebab Keberhasilan/ peningkatan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 8

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %	61.76 %	<p>1. adanya beberapa Kecamatan yang belum berkinerja baik dalam implementasi Sinergitas Kecamatan.</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimtek tentang Sinergitas; 2. Menyelenggarakan Monitoring/Evaluasi implementasi Sinergitas Kecamatan.

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 9

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Kegiatan
1	Prosentase Kecamatan yang berkinerja baik	60 %	61.76 %	<p>Program :</p> <p>Pemantapan Otonomi Kota</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Pemerintah Kelurahan. 2. Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN). 3. Evaluasi Perkembangan Kelurahan. 4. Updating Profil Kelurahan. 5. Pelaksanaan Inovasi Nasional (PIN) Desa / Kelurahan. 6. Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran

Nama SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN

Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		421,636,940.00	360,610,234.00	85,53%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,800,000.00	15,490,450.00	82.40%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,900,000.00	5,280,000.00	76.52%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	185,875,000.00	168,628,340.00	90.72%
		Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor Kedinasan	210,061,940.00	171,211,444.00	81.51%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		210,250,000.00	124,755,500.00	59.34%
		Pengadaan alat kantor alat rumah tangga alat studio dan alat komunikasi	32,500,000.00	26,940,000.00	82.89%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	27,000,000.00	24,334,100.00	90.13%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3,250,000.00	2,548,500.00	78.42%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	70,000,000.00	62,720,900.00	89.60%

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	45,000,000.00	18,855,000.00	41.90%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	25,000,000.00	8,797,000.00	35.19%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		59,700,000.00	57,590,000.00	96.47%
		Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	9,700,000.00	9,700,000.00	100.00%
		Penyelenggaraan Peringatan dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50,000,000.00	47,890,000.00	95.78%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		519.275.000,00	379.535.250,00	70,34%
		Bimtek/Workshop/Sosialisasi/ Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33,000,000.00	10,945,918.00	33.17%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22,500,000.00	12,279,500.00	54.58%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,500,000.00	6,822,000.00	90.96%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,500,000.00	5,457,500.00	72.77%
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	7,500,000.00	-	0.00%

		dan RAPBD SKPD			
6	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah		70,200,000.00	55,713,940.00	79.36%
		Penunjang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	70,200,000.00	55,713,940.00	79.36%
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		365,400,000.00	318,687,840.00	87.22%
		Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	83,900,000.00	69,933,700.00	83.35%
		Penyelenggaraan APEKSI	266,500,000.00	241,165,140.00	90.49%
		Monitoring Evaluasi Kerjasama	15,000,000.00	7,589,000.00	50.59%
8	Program Pemantapan Otonomi Kota		1.133.212.778,00	953.946.643,00	84,18%
		Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	403,841,000.00	320,120,150.00	79.27%
		Pemantapan Implementasi Kewenangan	26,289,278.00	3,315,000.00	12.61%
		Penataan Batas Daerah	-	-	0.00%
		Penamaan dan Pembakuan Rupa Bumi	71,825,000.00	68,025,000.00	94.71%
		Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Pemerintah Kelurahan	200,227,500.00	190,334,250.00	95.06%
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	52,350,000.00	47,622,000.00	90.97%
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan	52,000,000.00	49,256,000.00	94.72%

	Updating Profil Kelurahan	94,350,000.00	72,461,250.00	76.80%
	Pelaksanaan Inovasi Nasional (PIN) Desa / Kelurahan	-	-	0.00%
	Fasilitasi/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	53,670,000.00	47,517,993.00	88.54%
	Fasilitasi/Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	178,660,000.00	155,295,000.00	86.92%
		2,315,899,718.00	1,921,469,575.00	82.97%

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING

- a. Masih minimnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai rincian data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD seperti Indikator Kinerja Kunci dan Program Nasional, sehingga pemenuhan data dimaksud tidak sekaligus terkumpul dan butuh untuk direview beberapa kali;
- b. Masih minimnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur terkait Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- c. Masih terdapat dokumen perjanjian Kerja Sama yang pending atau dikan yang disebabkan adanya ketidak sepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama;
- d. Masih terdapat Kecamatan yang belum berkinerja baik dalam implementasi Sinergitas Kecamatan.

4.2. Rencana Tindaklanjut

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas di masa mendatang adalah :

- a. Perlu adanya koordinasi tim tingkat Kota yang melibatkan beberapa OPD seperti Bappeda, Inspektorat, dan BPPKAD agar penyusunan dan reuiu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat lebih optimal
- b. Perlu sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkenaan dengan program Sinergitas Kecamatan yang secara rinci dapat menjadi acuan pola perkembangan Kecamatan di tingkat Kota
- c. Perlu sosialisasi dan monitoring terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah kepada Masing- Masing OPD dan Pihak2 yang akan melakukan kerjasama yang lebih intensif

